



Sudahkah Akuntansi Kita Berpihak Pada Rakyat? (Refleksi Pemikiran Mohammad Hatta)

(Has Our Accounting Served the People? A Reflection of Mohammad Hatta's Thought)

Balance Stefany Ramandha^{*1)}, Krisno Septyan²⁾

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Jakarta, Indonesia^{1,2}

Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450

E-Mail: balancestefany65@gmail.com*)

Doi: <https://doi.org/10.35606/jabm.v32i2.1565>

Akuntansi Bisnis dan Manajemen (ABM),

Vol. 32

No. 02

Halaman 107-119,

Bulan Oktober, Tahun

2025

ISSN 0854-4190

E-ISSN 2685-3965

Abstract

This study aims to align accounting practices in Indonesia with the principles of a people-centered economy. Drawing on the philosophical ideas of Mohammad Hatta, a synchronic ontological approach is employed to foster a theoretical dialogue between contemporary thinkers and Hatta. The findings reveal that people-centered accounting prioritizes promoting domestic products and fosters nationalism by integrating local cultural values into accounting standards. This model is expected to transform accounting practices to reflect local wisdom better and contribute to societal well-being. The study offers a new perspective on how cultural values and ideologies can shape accounting practices, thus contributing to the development of culture-based accounting aligned with national development and economic sovereignty.

Keywords: Accounting; International Standard; Mohammad Hatta; Populist

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menyelaraskan penerapan akuntansi di Indonesia dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Mengacu pada gagasan filosofis Mohammad Hatta, pendekatan ontologis sinkronik digunakan untuk membangun dialog teoretis antara pemikir masa kini dan Hatta. Temuan menunjukkan bahwa akuntansi kerakyatan memprioritaskan promosi produk domestik serta menumbuhkan nasionalisme melalui integrasi nilai budaya lokal dalam standar akuntansi. Model ini diharapkan mentransformasi praktik akuntansi agar lebih mencerminkan kearifan lokal dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana nilai budaya dan ideologi dapat membentuk praktik akuntansi, sehingga berkontribusi terhadap pengembangan akuntansi berbasis budaya yang selaras dengan pembangunan nasional dan kedaulatan ekonomi.

Kata Kunci: Akuntansi; Kerakyatan; Mohammad Hatta; Standar Internasional

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:

30 April 2025

Tanggal Revisi:

26 Juni 2025

Tanggal Diterima:

5 Agustus 2025

PENDAHULUAN

Siklus akuntansi, yang sering digambarkan sebagai proses harmonis dan terstruktur, sebenarnya penuh dengan ilusi keteraturan dan transparansi yang sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Adillah et al., 2023; Ratnaningrum, 2021; Yandari & Rofik, 2019). Setiap transaksi yang dicatat dan dianalisis memberi impresi bahwa kondisi keuangan dianggap sangat akurat untuk pengambilan keputusan (Hasanah et al., 2022). Namun, laporan keuangan yang tampak rapi ini sering digunakan sebagai alat pemuas kaum kapitalis untuk memanipulasi publik, sementara aktor-aktor di balik layar seperti akuntan, auditor dan sejenisnya, yang seharusnya bersikap netral (karena sebagian pihak menganggap akuntansi bebas nilai) malah terlibat dalam manipulasi demi kepentingan elit itu tadi (Batoro & Suryono, 2020; Saad, 2021). Dengan kata lain, akuntan benar-benar menunjukkan keberpihakannya pada golongan tertentu.

Kode etik dan standar profesi yang ada, alih-alih menjaga integritas, malah berfungsi sebagai legitimasi untuk melancarkan proyek kapitalis. Gelar-gelar prestisius seperti *Chartered Accountant*, yang diimpor dari standar internasional, patut dipertanyakan karena bukannya menjamin transparansi dan integritas, gelar ini justru menunjukkan keberpihakannya pada kaum kapitalis dan setuju dengan keberadaan mereka (Kamayanti, 2020). Buktinya, apakah gelar tersebut menjamin kejujuran dalam bertransaksi? Tidak dipungkiri bahwa kasus-kasus korupsi dapat dikuak dengan akuntansi, tapi kita tidak bisa menutup mata juga bahwa penggelapan-penggelapan itu juga terjadi karena informasi yang dihasilkan oleh akuntansi itu sendiri. Artinya akuntansi komersial adalah akuntansi yang membawa kerusakan pada semesta (Ala & Lapsley, 2019; Chiapello, 2007), beberapa referensi tersebut secara jelas menunjukkan sejarah mengerikan yang disebabkan oleh negara-negara yang merumuskan standar tersebut. Pertanyaannya, layakkah kita terus menggunakan standar yang sebenarnya mereka sendiri telah gagal menciptakan kedamaian? Terlebih lagi di Indonesia, negara dengan nuansa religius yang kental. Pertanyaan yang lebih mendalam adalah apakah akuntansi kita benar-benar mengarah pada kedamaian sejati, seperti kedamaian batin? Atau justru, akuntansi yang terjerat dalam kapitalisme ini adalah antitesis dari kedamaian batin, sebuah manifestasi dari keserakahan dan ketidakadilan?

Di sisi lain, kondisi Indonesia saat ini sangatlah kontras dengan pemikiran Bung Hatta, di mana kapitalisme merajalela dan rakyat yang kurang berdaya terus terpinggirkan. Hatta berjuang agar ekonomi dikelola oleh rakyat, untuk kesejahteraan bukan oleh segelintir elit yang menguasai kekayaan negara. Namun, di era modern ini, sistem yang berjalan justru lebih berpihak kepada korporasi besar dan pemodal asing, sementara kesenjangan semakin lebar (Munzir & Syamsuddin, 2020). Ekonomi kerakyatan yang Hatta cita-citakan, yang mengutamakan keadilan dan pemerataan, malah semakin diabaikan. Akuntansi modern yang dipromosikan sebagai standar global justru membuka celah manipulasi, bahkan melalui teknologi seperti *real-time accounting* dan *blockchain*, yang seharusnya meningkatkan transparansi (Bonsón & Bednárová, 2019; Pratiwi, 2022). Ironisnya, teknologi ini sering kali digunakan untuk penghindaran pajak, dengan laporan keuangan yang dimanipulasi agar laba bersih tampak lebih rendah (Lestari et al., 2020).

Banyak perusahaan besar bahkan memiliki dua versi laporan keuangan, satu untuk investor dan satunya disembunyikan dari negara. Mereka berpura-pura menjadi pahlawan ekonomi di depan publik, sementara di belakang layar mereka menghindari kewajiban pajak dan memperkaya diri. Lebih memprihatinkan lagi, prinsip etika, transparansi, dan akuntabilitas yang dipromosikan dalam akuntansi modern hanyalah jargon. *Corporate governance* yang katanya menghubungkan manajer, direktur, dan pemegang saham untuk kepentingan bersama, semakin memperjelas hanya mereka pihak yang penting dalam perusahaan, adapun yang lain

adalah tidak penting (Sari, 2021; Syofyan, 2021). Akuntansi yang melebarkan sayapnya bahwa tidak hanya mempengaruhi para eksekutif yang menjadi perhatian tapi juga sosial, meluncurkan program dan pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang diwajibkan untuk transparansi dan akuntabilitas (Afifah et al., 2021; Ballou et al., 2018; Elvadri et al., 2023; Guo et al., 2020; Hasanah et al., 2024; Yuan et al., 2020), perlu diragukan efektivitasnya. Apakah CSR benar-benar berdampak atau hanya formalitas menjaga citra? Banyak perusahaan memanfaatkan CSR untuk *greenwashing*, menciptakan ilusi kepedulian sambil tetap merusak lingkungan dan menciptakan ketidakadilan sosial. Laporan CSR hanyalah sandiwara untuk **mengelabui publik** dan regulator, dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai retorika tanpa tindakan nyata (Milne et al., 2009; Nunes & Park, 2017). Jadi, bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa standar yang dipaksakan dari luar cocok dengan jiwa bangsa ini? Faktanya, aturan-aturan ini hanyalah formalitas, tanpa menyentuh akar ketidakadilan yang terus menyebar ke tanah air, kemudian akar ketidakadilan itu keluar dan memporakporandakan tanah air kita yang penuh nilai luhur.

Kritik diatas mendorong peneliti untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan, bahwa standar akuntansi internasional tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan maupun nilai-nilai lokal (Aneswari & Musmini, 2017). IFRS, misalnya, menjadikan laba dan nilai wajar sebagai pusat segalanya, menganggap bahwa keadilan sosial dapat direduksi menjadi angka-angka finansial. Standar ini menyingkirkan konteks lokal, menggantinya dengan aturan teknis yang kering dan tidak berpihak, menjadikan akuntansi tunduk pada pasar, bukan pada rakyat. Dalam penelitian sebelumnya sudah ada yang menggunakan pemikiran ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta yang mengaitkannya dalam perspektif ekonomi syariah (Arifqi, 2020; Wulandari & Hasan, 2023; Yusuf et al., 2019) dan krisis ekonomi 1998 (Suyono, 2021). Namun, belum ada yang mengaitkannya dalam ranah akuntansi. Oleh karena itu, peneliti berupaya memanfaatkan celah ini sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat [akuntansi] agar merenungi kembali: apakah sistem akuntansi modern yang kita adopsi dari Barat masih relevan dengan nilai-nilai lokal dan cita-cita bangsa sendiri? Penelitian ini membuka peluang diskusi yang lebih luas untuk mengundang para peneliti berdialog dalam merumuskan diskursus akuntansi yang berpihak pada rakyat dan mendorong terwujudnya kemandirian akuntansi nasional.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pemikiran Mohammad Hatta tidak hanya dijadikan sebagai objek kajian, tetapi diturunkan menjadi metode dengan menjadikannya sebagai informan utama. Banyak riset akuntansi yang menggunakan tokoh nasional menjadi metode penelitian (Ambarwati et al., 2021; Kamayanti, 2013; Septyan & Mintojuwono, 2023; Shahib, 2016; Widianingsih, 2021), yang akhirnya para tokoh tersebut menyadarkan kita bahwa Indonesia adalah bangsa yang unggul dan jika kita menggunakan budaya lokal maka akuntansi dan ekonomi kita lebih maju dibanding bangsa lain. Untuk menurunkan pemikiran menjadi metode, perlu dilakukan sinkronisasi ontologis (Kamayanti, 2021). Langkah pertama yang diambil adalah menjawab pertanyaan ontologis dengan memahami pandangan Hatta mengenai eksistensi Tuhan, konsep ilmu yang ideal, realitas yang diinginkan, serta peran manusia dalam akuntansi dan ekonomi. Sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia sekaligus Bapak Ekonomi Kerakyatan (Hanani & Sari, 2018; Wulandari & Hasan, 2023), Hatta menekankan bahwa iman kepada Tuhan membawa tanggung jawab sosial (Fuady, 2019, 2020; Hutajulu, 2023; Itang, 2016). Baginya, setiap tindakan, termasuk dalam kegiatan ekonomi, harus berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Hatta berpendapat bahwa manusia tanpa moralitas yang berakar pada iman akan mudah tersesat dalam materialisme dan egoisme, hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Pandangan ini tercermin

dalam kritik Hatta terhadap kapitalisme, yang menurutnya cenderung mengeksploitasi rakyat yang lemah. Ia percaya bahwa sistem ekonomi yang baik adalah yang memperhatikan keadilan dan kesejahteraan sosial, berlandaskan prinsip-prinsip moral. Pemikiran ekonomi kerakyatan Hatta ini lahir dari perjuangannya melawan kolonialisme, di mana ia menyaksikan bagaimana kapitalisme kolonial hanya menguntungkan penjajah, sementara rakyat yang lemah tertindas. Bagi Hatta, realitas ilmu yang ideal adalah ilmu yang digunakan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, yang berlandaskan keadilan, moral, dan etika. Dalam konteks ini, ilmu akuntansi tidak boleh hanya berfungsi untuk menghitung laba atau kerugian, melainkan harus menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Akuntansi harus dipahami sebagai instrumen yang memastikan bisnis berkontribusi pada kesejahteraan bersama dan tidak mengabaikan tanggung jawab sosialnya.

Langkah kedua dalam penelitian ini adalah menyelaraskan pemikiran Bung Hatta di masa lalu dengan pandangan peneliti saat ini terkait realitas ilmu akuntansi dan manusia. Penerapan akuntansi modern cenderung melibatkan pihak-pihak berkepentingan yang sering kali mengabaikan moral dan etika (Aneswari & Musmini, 2017). Berdasarkan paradigma kritis, peneliti memandang bahwa realitas akuntansi modern berada dalam kondisi yang tidak ideal. Akuntansi hari ini bukan lagi alat pencipta keadilan, melainkan mesin pengabdian pasar yang membungkus keserakahan dalam laporan keuangan yang tampak sah. Karena itu, dibutuhkan kesadaran kritis dan upaya perbaikan melalui kajian ini. Dengan demikian, penelitian ini berpijak pada kuadran radikal humanis (Burrell & Morgan, 1979). Peneliti melihat adanya kesalahan mendasar dalam akuntansi modern.

Akuntansi modern memang menjunjung transparansi dan akuntabilitas, namun hanya dalam batas etika profesi yang dibentuk oleh logika pasar. Standar yang kita adopsi dari luar sekadar hasil salin-tempel, yang akhirnya menjadikan akuntansi tunduk pada satu tujuan yaitu laba. Memang, segala bentuk praktik ini terlihat sah dalam bingkai etika profesi. Namun pertanyaannya, etika yang dibangun di atas nilai siapa? Etika dalam akuntansi hari ini lahir dari ruang sekuler, terpisah dari nilai-nilai ketuhanan yang menempatkan tanggung jawab sosial dan keadilan sebagai inti moralitas (Hanani & Sari, 2018). Etika itu terbatas pada ruang dan waktu sehingga jelas bahwa SAK yang selalu direvisi bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan karena permintaan klien, dipertimbangkan di IAI berdasarkan mana yang paling menguntungkan (Maulana, 2019). Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang dikemukakan oleh Bung Hatta, yang menegaskan bahwa ekonomi seharusnya melayani kepentingan rakyat banyak, bukan hanya segelintir individu. Namun, dalam realitas dunia bisnis, yang sering terjadi justru sebaliknya. Tanggung jawab sosial dan etika kerap diabaikan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, menjadikan siklus akuntansi sebagai alat manipulasi, bukan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Data primer diperoleh dari karya-karya asli Bung Hatta yang tidak diperlakukan sebagai teks mati, melainkan diselami sebagai denyut pemikiran yang terus hidup. Peneliti tidak sekadar membaca, tetapi menempuh perjalanan intelektual yang radikal, masuk ke dalam ruang sejarah Hatta, menyelami batinnya, menafsirkan kegelisahannya, hingga menyatu secara sinkronis dengan semangat perlawanan yang diwariskan. Proses ini bukan sekadar studi akademik, tetapi sebuah upaya menyambung kesadaran bahwa apa yang diperjuangkan Hatta di masa kolonial kini kembali relevan, ketika akuntansi modern tunduk pada bentuk penjajahan baru (penjajahan melalui standar global). Melalui pembacaan kritis dan reflektif, pemikiran Hatta dijadikan pisau analisis untuk membongkar kedok netralitas akuntansi, yang telah menjelma menjadi instrumen teknokratis bagi akumulasi modal, sambil menyingkirkan nilai-nilai ketuhanan yang seharusnya menjadi jantung ekonomi bangsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengkhianatan terhadap Kedaulatan Rakyat

Mohammad Hatta meletakkan Tuhan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan kekuatan moral. Dari keyakinan itu, ia menggagas kesejahteraan semesta dalam lingkup bangsa Indonesia melalui ekonomi kerakyatan, wujud keberpihakan pada umat (Iqbal, 2014). Gagasan ini merefleksikan tugas manusia sebagai *khalifatullah fil ardh*, yakni membagi kesejahteraan, bukan menumpuk kekayaan. Artinya, eksistensi Tuhan menjadi dasar seluruh pemikiran dan tindakannya. Sebagai peneliti yang juga seorang Muslim, keyakinan bahwa manusia diciptakan bukan hanya sebagai abdullah, tetapi juga khalifah di bumi, menjadi dasar sikap keberpihakan dalam riset ini. Konsep ini juga banyak dikaji dalam riset akuntansi syariah (Triyuwono, 1997).

Realitas pahit yang kita hadapi saat ini menunjukkan betapa Indonesia telah melenceng jauh dari cita-cita awal kemerdekaan (Hariyati, 2011; Nugroho et al., 2023). Mohammad Hatta pernah menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah tujuan akhir, melainkan syarat untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat. Tetapi, setelah puluhan tahun kemerdekaan, di mana kebahagiaan dan kemakmuran itu? Rakyat kecil terus-menerus dihipnotis oleh PHK massal, gaji yang ditunggak, dan biaya hidup yang melambung (Argarinjani, 2023; Itasari & Kristanto, 2018; Nastiti & Ratmono, 2015; Rukmana, 2017), sementara kebijakan ekonomi yang diambil malah tunduk pada kapitalisme global. Salah satu pengkhianatan terbesar terhadap rakyat adalah adopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) secara penuh sejak 2014 (Lestari, 2024), sebuah langkah yang lebih mementingkan investor asing daripada kebutuhan bangsa sendiri. Jadi, pertanyaan retorisnya adalah apakah IFRS memberi kontribusi bagi negeri ini, secara khusus bagi rakyat?

IFRS adalah produk kapitalisme Barat yang hanya peduli pada laba dan efisiensi, tanpa memperdulikan dampaknya terhadap rakyat kecil. Kasus *fraud* PT Indofarma Tbk awal 2024 adalah bukti nyata bagaimana IFRS menjadi alat ketidakadilan. Perusahaan ini dengan kejam menunda gaji karyawan selama berbulan-bulan, sementara laporan keuangannya terus dimanipulasi untuk menutupi masalah manajemen. Standar yang seharusnya memastikan transparansi justru membuka celah bagi manipulasi, terutama melalui penggunaan konsep nilai wajar (*fair value*) dan pertimbangan profesional (*professional judgment*). Di balik istilah teknis yang tampak objektif, tersembunyi peluang bagi perusahaan dan auditor untuk “mengatur” angka demi melayani kepentingan modal. Ketika nilai aset bisa disesuaikan dengan selera pasar dan kehendak manajemen, akuntansi kehilangan integritasnya berubah dari alat kontrol menjadi topeng legal bagi keserakahan elite ekonomi (Anwar, 2022).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) seharusnya menciptakan standar akuntansi yang mendukung kebutuhan lokal, tetapi nyatanya lebih memilih menjadi “antek-antek” kapitalisme global dengan mengadopsi IFRS tanpa mempertimbangkan dampak buruknya. Dengan dalih meningkatkan daya saing global, IFRS malah memperkuat kesenjangan ekonomi, memperburuk asimetri informasi, dan membuka peluang manipulasi laba yang merugikan buruh serta masyarakat kecil (Argarinjani, 2023; Itasari & Kristanto, 2018; Nastiti & Ratmono, 2015; Rukmana, 2017). Tidak ada sedikit pun keberpihakan pada rakyat dalam situasi seperti ini, yang ada hanyalah pengkhianatan terhadap mereka yang paling membutuhkan keadilan.

Standar ini tanpa kompromi mengabaikan kedaulatan rakyat, menggantinya dengan logika pasar bebas yang melanggengkan kekuasaan segelintir elite global (Aburous, 2018; Laaksonen, 2022; Mantzari & Georgiou, 2019). Di balik jargon harmonisasi dan keseragaman laporan keuangan, tersembunyi kekuatan hegemonik yang memaksa bangsa-bangsa tunduk pada aturan yang tidak mereka ciptakan (Aburous, 2018). Konsep *fair value* yang diagungkan

dalam IFRS, misalnya, memberi ruang legal bagi korporasi untuk menaikkan valuasi lahan atau sumber daya alam sesuai harga pasar global bukan berdasarkan nilai sosial, ekologis, atau kebutuhan rakyat (Murtianingsih & Setiawan, 2016; Rapp et al., 2024). Akibatnya, tanah bisa dengan mudah dialihkan untuk kepentingan investasi, mengorbankan petani, masyarakat adat, dan ekosistem (Kadri et al., 2023). Lebih jauh, skema *revenue recognition* dalam IFRS 15 memungkinkan perusahaan mengakui pendapatan lebih awal tanpa memperhitungkan distribusi nilai kepada buruh atau masyarakat sekitar (Morawska, 2021). Ini menjadi dalih akuntansi untuk menjustifikasi eksploitasi tenaga kerja murah dan perampasan hasil bumi. Sementara laporan keuangan tampil indah di atas kertas, di bawahnya tersembunyi derita rakyat dan kerusakan alam yang terus dilanggengkan demi menumpuk laba bagi investor asing dan konglomerat domestik (Kumarasiri & Fisher, 2011; Thesing & Velte, 2021).

Tergerusnya Keadilan Sosial

Nilai Pancasila, khususnya sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” seharusnya menjadi landasan untuk menciptakan kehidupan yang adil, makmur, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat (Aneswari & Musmini, 2017; Sitorus, 2015). Sebab, menurut Hatta, makna ‘**rakyat Indonesia**’ bukan sekadar angka dalam statistik ekonomi, melainkan **rakyat dengan ruh kolektif** yang memiliki hak atas kedaulatan ekonomi (Wahyudi, 2022). Namun, kenyataannya, penerapan IFRS di Indonesia telah mencemarkan nilai luhur ini dengan menyusupkan ideologi kapitalisme global yang bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat. Pemerintah Indonesia, dalam ambisi meningkatkan pendapatan domestik bruto, membuka keran perdagangan bebas selebar-lebarnya, termasuk dalam regulasi standar akuntansi (Sitorus, 2015). Standar ini disesuaikan dengan kepentingan organisasi akuntansi internasional dan pasar global, yang hanya melayani kepentingan para investor asing. Dalam euforia mengejar angka-angka pertumbuhan ekonomi, kehidupan manusia diabaikan, lapisan rakyat yang lemah terpinggirkan, dan korporasi besar semakin leluasa memanipulasi laporan keuangan demi keuntungan sepihak. Praktik ini jelas bertolak belakang dengan Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “perekonomian seharusnya dibangun atas asas kebersamaan”, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar yang liar (Sitorus, 2015). Akibatnya, rakyat, terutama yang berada di lapisan bawah, menjadi korban marginalisasi sosial, kehilangan akses terhadap keadilan ekonomi, dan terputus dari semangat kebersamaan dan solidaritas yang menjadi jati diri bangsa. Dalam sistem ini, kedaulatan rakyat tidak lagi berarti apa-apa, hanya menjadi ilusi yang terus terkikis oleh dominasi pasar yang tanpa henti merampas hak-hak mereka atas kehidupan yang layak dan bermartabat.

Penciptaan Diabolisme Intelektual Akuntan

Pemerintah mulai memberlakukan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) sejak 1 Januari 2018 (Dwijayanti et al., 2024), penerapan ini malah memperburuk keadaan ekonomi pelaku UMKM dengan menciptakan jebakan ketergantungan pada utang. Meskipun diklaim dapat mempermudah pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan mengakses permodalan (Dwijayanti et al., 2024), standar ini malah memperburuk mentalitas parasit yang mengandalkan utang sebagai solusi utama untuk mengembangkan usaha. Pengaturan ini memudahkan akses kredit melalui sistem perbankan, tetapi yang terjadi adalah ilusi bahwa utang adalah satu-satunya jalan untuk berkembang. Bukannya memberdayakan pelaku usaha kecil, SAK EMKM justru menjebak mereka dalam

ketergantungan finansial yang merugikan, menjadikan mereka budak sistem perbankan yang menunggu uluran tangan.

Lebih jauh lagi, penerapan basis akrual dalam SAK EMKM, yang mengharuskan pengakuan pendapatan dan beban saat transaksi terjadi, semakin memperburuk beban administratif yang tidak relevan dengan realitas operasional harian UMKM (Gusneli et al., 2023). Hal ini semakin menjauhkan UMKM dari esensi ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada kemandirian dan pemerataan. Ketika dibandingkan dengan SAK ETAP, yang disahkan pada 19 Mei 2009 untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, masalahnya semakin jelas (Fadilah et al., 2024). SAK ETAP memberikan kelonggaran dengan memungkinkan laporan keuangan UMKM diaudit dan mendapatkan opini audit (Oktavia & Sunrowiyati, 2019), tetapi pada kenyataannya ini malah mendorong mereka masuk ke dalam ekosistem formal yang didominasi oleh standar kapitalistik. Hal ini menambah tekanan bagi UMKM, banyak di antaranya yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, untuk memenuhi tuntutan administratif yang kompleks, yang mengalihkan fokus mereka dari inovasi dan pengembangan usaha (Fadilah et al., 2024; Gusneli et al., 2023).

Sistem ini tidak hanya beroperasi di pasar, tetapi juga dijalankan di kampus-kampus, menjadikan institusi akademik sebagai subordinat kekuatan kapitalis. Penciptaan diabolisme ini telah berlangsung sejak pendidikan akuntansi mulai menerima begitu saja logika pasar tanpa kritik, membentuk persepsi bahwa akuntansi dan standar yang ada adalah sesuatu yang wajar dan netral. Tidak semua kampus membahas sisi negatif dari pembelajaran akuntansi; aspek-aspek seperti teori, laporan keuangan, dan standar yang diterapkan diajarkan dalam bingkai akademik yang membenarkan segalanya. Bahkan, etika profesi yang seharusnya menjadi kontrol moral justru lebih sering digunakan untuk melegalkan tindakan-tindakan akuntan yang sebenarnya tidak selalu baik-baik saja.

SAK EMKM dan SAK ETAP tidak hanya menjerumuskan UMKM ke dalam jebakan riba, praktik yang dilaknat dalam QS Al-Baqarah ayat 275 sebagai dosa besar yang mengundang murka Allah, tetapi juga menghancurkan nilai qana'ah, menjadikan pelaku UMKM tawanan sistem utang yang terus mendorong mereka untuk mengejar lebih tanpa pernah merasa cukup, yang pada akhirnya memupuk budaya serakah dan mengikis prinsip hidup sederhana. Dengan mempermudah akses kredit, standar ini mendorong pelaku UMKM untuk terus mencari utang demi memenuhi tuntutan pengembangan usaha yang dikondisikan oleh sistem perbankan, bukannya mengandalkan kekuatan usaha mereka sendiri. Hal ini merusak kemandirian finansial mereka, sekaligus memperburuk integritas moral dan finansial dalam jangka panjang. Waktu yang terbuang untuk memenuhi persyaratan administratif laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dan SAK ETAP hanya menguntungkan lembaga eksternal seperti perbankan dan auditor, sementara pelaku UMKM tetap terperangkap dalam beban berat yang tidak memberikan manfaat langsung bagi kelangsungan usaha mereka. Penerapan standar ini juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat, karena bukannya memberdayakan UMKM, justru menjerumuskan mereka ke dalam jerat eksploitasi kapitalistik, menjadikan mereka pion dalam permainan ekonomi global yang semakin memperlebar jurang ketidakadilan.

Koperasi Sebagai Tampanan Keras

Ketika Bung Hatta menetap di Belanda, beliau terlibat dalam diskusi-diskusi penting yang mengubah arah pemikirannya secara radikal, terutama mengenai ekonomi dan politik. Beliau juga terjun langsung dalam wadah politik melalui Perhimpunan Indonesia (*Indische Vereeniging*). Melalui berbagai diskusi panas dengan mahasiswa Indonesia lainnya, akademisi, dan aktivis dari seluruh penjuru dunia, Hatta mendalami teori ekonomi yang menantang kapitalisme. Adanya diskusi-diskusi ini bukan sekedar retorika kosong, tetapi menyentuh inti

masalah yang dihadapi Indonesia di bawah penjajahan Belanda, di mana kapitalisme kolonial dengan brutal menindas rakyat, sekaligus memperkaya segelintir elit dan penjajah.

Melalui studinya mengenai pemikiran tokoh-tokoh sosialis, termasuk Karl Marx, Bung Hatta semakin mendalami kritik terhadap sistem kapitalis yang rakus. Hatta menyerap literatur Marxis dan gagasan sosialisme Eropa, namun tetap dengan kejelian kritis, beliau tidak menelan mentah-mentah ideologi tersebut. Beliau paham bahwa model sosialisme harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan kebudayaan Indonesia, di mana pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial menjadi prioritas (Dinejad et al., 2022). Bagi Hatta, kemerdekaan politik tidak akan berarti tanpa kemerdekaan ekonomi yang membebaskan rakyat dari jeratan eksploitasi. Melalui diskusi dan studi mendalamnya, Hatta menemukan koperasi sebagai sistem ekonomi alternatif. Berbeda dengan Karl Marx yang menawarkan akuntansi sosialis sebagai alternatif (Suseno, 1999), Hatta melihat koperasi sebagai solusi yang lebih sesuai dengan semangat gotong royong dan kebersamaan. Bagi beliau, koperasi bukan hanya jawaban, tetapi juga tamparan keras bagi kapitalisme yang rakus dan tak pernah puas (Hatta, 1957).

Standar internasional seperti IFRS, yang diimpor dari negara asing tanpa mempertimbangkan realitas dan kebutuhan lokal, seharusnya tidak diterapkan secara dogmatis. Peniruan dogmatis terhadap standar asing ini, yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat Indonesia, bukanlah solusi (Hatta, 1975). Sebaliknya, standar seperti IFRS hanya memperkuat kapitalisme global yang menguntungkan segelintir elit, mengabaikan kedaulatan rakyat, dan melanggar ketidakadilan ekonomi (Engels, 2007). Sementara masyarakat kecil dan pelaku ekonomi lokal semakin terpinggirkan, adopsi standar internasional ini malah melanggar ketimpangan sosial yang diperparah oleh ketergantungan pada model perekonomian luar negeri yang bertentangan dengan nilai-nilai gotong royong dan pemerataan yang seharusnya menjadi dasar bangsa ini.

Marxisme vs Ekonomi Kerakyatan

Kita semua tahu bahwa Karl Marx sebagai penggerak gerakan sosial akibat tertindasnya kaum proletar dari kaum borjuis. Namun, solusi yang ditawarkan Marx kerap kali melalui revolusi sosial yang berujung destruktif (Hendriwani, 2020; Suseno, 1999), karena Marx melihat konflik sebagai jalan perubahan yang tak terhindarkan (Hatta, 1972). Di sinilah ekonomi kerakyatan Bung Hatta membuktikan superioritas moralnya. Hatta menolak kapitalisme dengan cara yang lebih elegan dan tanpa kekerasan, menggantinya dengan sistem berbasis gotong royong dan keadilan sosial. Beliau meyakini bahwa perubahan sejati berasal dari persatuan dan kebersamaan, bukan dari perpecahan internal yang justru memperburuk penderitaan rakyat kecil. Jika Marx melihat agama sebagai “candu” (Muttaqin, 2013) dan tanda keterasingan manusia (Suseno, 1999), Hatta justru menekankan agama sebagai sumber moralitas ekonomi yang adil (Fuady, 2020). Dengan demikian, agama (dalam hal ini tauhid) bukanlah tanda keterasingan manusia, melainkan fondasi yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan (Choudhury, 2019), yang membimbing manusia untuk berperilaku adil dan etis dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam ranah ekonomi. Perjuangan Bung Hatta ini juga sejalan dengan semangat Tap MPR No. XXV/MPR/1998 yang dengan tegas melarang penyebaran paham Marxisme, Leninisme, dan komunisme di Indonesia. Lagi pula klaim revolusioner marxisme, hanya memicu konflik yang memperburuk kondisi sosial, sementara ekonomi kerakyatan Hatta menawarkan solusi yang lebih manusiawi, beretika, dan sesuai dengan karakter Indonesia yang religius dan damai (Andrianie et al., 2019). Nilai-nilai ekonomi kerakyatan tersebut, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan tanggung jawab spiritual, membuka kemungkinan bagi lahirnya sistem akuntansi yang membela kepentingan rakyat, bukan tunduk pada kapitalisme global. Jika standar internasional seperti IFRS menjadikan pasar sebagai kompas utama, maka

akuntansi berbasis ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat dan keadilan sebagai pusatnya. Di sinilah nilai-nilai tauhid yang diyakini Hatta dapat menjadi dasar moral untuk membangun akuntansi yang tidak sekadar melaporkan angka, tetapi merefleksikan keberpihakan sosial dan kedaulatan ekonomi bangsa (Mulawarman, 2014). Ini adalah bentuk perlawanan sejati terhadap kapitalisme bukanlah dengan kekerasan, tetapi dengan keadilan yang tegak tanpa kompromi, etika yang tak bisa dibeli, dan kedaulatan rakyat yang menuntut pengakuan.

Struktur subbab dalam pembahasan ini dirancang sebagai jalan pembongkaran sistem akuntansi modern yang sudah kehilangan nurani. Urutan dimulai dari “Pengkhianatan terhadap Kedaulatan Rakyat” karena inilah akar kerusakan, kekuasaan ekonomi direbut dari tangan rakyat dan diserahkan pada logika pasar global. Lalu, masuk ke “Tergerusnya Keadilan Sosial,” saat akuntansi tak lagi berpihak pada nilai keadilan, tapi pada efisiensi yang menindas. Dilanjut dengan “Penciptaan Diabolisme Intelektual Akuntan,” sebagai kritik tajam terhadap peran para akuntan yang membungkus ketimpangan dengan laporan keuangan yang tampak sah. Subbab “Koperasi sebagai Tampan Keras” menjadi refleksi keras bahwa Indonesia pernah punya jalan ekonomi berbasis nilai-nilai luhur yang kini dikubur oleh standar global. Akhirnya, “Marxisme vs Ekonomi Kerakyatan” bukan sekadar pembandingan ideologi, tapi penegasan bahwa Indonesia punya jalan sendiri. Kita tidak butuh kapitalisme yang menindas atau Marxisme yang membakar, kita butuh akuntansi yang beriman, ekonomi yang bermoral, dan sistem yang tak tunduk pada tuan-tuan global. Seluruh urutan ini selaras dengan metode yang digunakan, menjadikan Bung Hatta sebagai informan utama dan pisau analisis untuk menggugat sistem akuntansi global yang telah mengkhianati rakyat.

KESIMPULAN

Pendidikan akuntansi di Indonesia tidak bisa terus-menerus menjadi ruang reproduksi dogma global. Ia harus segera melepaskan diri dari peran sebagai mesin penghafal standar internasional yang memuja laba menjadi ruang pembentukan akuntan yang beretika, berpihak pada rakyat, dan menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Ketundukan pada IFRS bukan hanya membelenggu kreativitas akademik dan pemikiran kritis, tetapi juga memperkuat kolonialisme ekonomi dalam wajah baru, menjadikan akuntansi sebagai alat domestikasi pasar, bukan pembela rakyat. Sudah waktunya kita menggugat: mengapa akuntansi tidak bicara tentang penderitaan rakyat? Mengapa keadilan sosial dan nilai ketuhanan tidak pernah masuk dalam neraca? Maka, yang mendesak bukan integrasi indikator sosial ala Barat, tapi pembongkaran paradigma dan pembangunan ulang metode berbasis nilai bangsa sendiri.

Namun demikian, penulis menyadari bahwa riset ini masih sebatas kritik, seperti halnya sebagian besar riset dalam ranah akuntansi kritis (Kamayanti, 2020; Septyan & Mintoyuwono, 2023) yang belum sepenuhnya mampu menghadirkan solusi praktis. Kritik ini justru menjadi batu loncatan awal menuju diskursus yang lebih luas mengenai upaya merumuskan sistem akuntansi yang berdaulat dan berpihak pada umat. Penelitian ini sangat subjektif dan bersifat reflektif karena proses sinkronisasi antara pemikiran Bung Hatta dan kegelisahan peneliti tentu tidak memiliki ukuran pasti apakah telah menyerap pemikiran beliau secara utuh. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap dialog, kritik, dan kontribusi dari peneliti lain untuk bersama-sama mengembangkan tafsir yang lebih mendalam terhadap pemikiran Hatta.

Penelitian ini tidak mengklaim telah menangkap sosok Hatta secara utuh. Apa yang dilakukan peneliti hanyalah upaya awal, menyelami jejak pemikiran yang nyaris terkubur di tengah hingar-bingar akuntansi global yang semakin menjauh dari nurani bangsa. Pendekatan sinkronis ini pun belum menyentuh ruang-ruang historis lain seperti situs, keturunan, dan

tradisi lisan yang menyimpan napas asli perjuangan Hatta. Namun justru karena keterbatasan inilah, riset ini melemparkan tantangan: sudah cukup lama akuntansi menjadi alat penakluk, kapan ia menjadi alat pembebasan? Sudah saatnya kita membangun metodologi dari dalam, berpijak pada nilai lokal, spiritualitas, dan cita-cita kebangsaan bukan sekadar mengulang dogma standar yang tak peduli pada realitas umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburous, D. (2018). IFRS and Institutional Work in the Accounting Domain. *Critical Perspectives on Accounting*, 62, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.10.001>
- Adillah, S. N., Ardyanti, C. P., & Nurlaila. (2023). Implementasi Teori Akuntansi dalam Perumusan Standar Akuntansi Pelaporan Keuangan. *JURA: Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2), 199–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i2.525>
- Afifah, N., Wahyuning Astuti, S. W., & Irawan, D. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Reputasi Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 5(3), 346–364. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i3.4644>
- Ala, A. S., & Lapsley, I. (2019). Accounting for Crime in The Neoliberal World. *The British Accounting Review*, 51(5), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.100839>
- Ambarwati, R. D., Qadri, R. A., & Hadi, M. (2021). Tjokro-[ism] Case Study: Reconciling the Tangled-Thread of Cash Management in Treasury Accounting Field. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 14(2), 150–169.
- Andrianie, S., Arofah, L., & Ariyanto, R. D. (2019). *Karakter Religius: Sebuah Tantangan dalam Menciptakan Media Pendidikan Karakter* (T. Q. Media, Ed.). CV. Penerbit Qiara Media.
- Aneswari, Y. R., & Musmini, L. S. (2017). Quo Vadis Pancasila dalam Pendidikan Akuntansi di Indonesia? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 149–165. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7045>
- Anwar, P. H. (2022). Revealing Creative Accounting Practices: A Professional Ethics Perspective. *Islamic Accounting and Finance Review*, 3(1), 165–172. www.infobanknews.com
- Argarinjani, R. (2023). Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba (Studi Konseptual). *Jurnal Ekonomika*45, 10(2), 251–262.
- Arifqi, M. M. (2020). Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia (Tela'ah Pemikiran Muhammad Hatta). *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 57–73.
- Ballou, B., Chen, P. C., Grenier, J. H., & Heitger, D. L. (2018). Corporate Social Responsibility Assurance and Reporting Quality: Evidence from Restatements. *Journal of Accounting and Public Policy*, 37(2), 167–188. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2018.02.001>
- Batoro, K. T., & Suryono, B. (2020). Pengaruh Independensi dan Objektivitas terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Kantor Akuntan Publik di Surabaya). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1–15.
- Bonsón, E., & Bednárová, M. (2019). Blockchain and Its Implications for Accounting and Auditing. *Meditari Accountancy Research*, 27(5), 725–740. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-11-2018-0406>
- Burrell, G., & Morgan, G. (1979). *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life*. Ashgate.
- Chiapello, E. (2007). Accounting and The Birth of The Notion of Capitalism. *Critical Perspectives on Accounting*, 18(3), 263–296. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2005.11.012>
- Choudhury, M. A. (2019). *The Tawhidi Methodological Worldview A Transdisciplinary Study of Islamic Economics*. Springer Nature Singapore Pte Ltd. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-6585-0>
- Dinejad, A. F., Idris, A., Siswanti, A., Nursasi, A., Oktavian, D. P., Yuliyanto, D., Solanta, E., Tarigan, J., Haganta, K., Banjarnahor, K. R., Kierby, Kaka, M. G. A., Naufal, M., Hanafi, M. S., Suryana, N., Rohmadi, N., Alvat, P. A., Rahmat, W. R., & Sujaya, Y. H. (2022). *Demokrasi, HAM, Antikorupsi Bung Hatta* (K. Materay, Ed.). Bung Hatta Anti Corruption Award.

- Dwijayanti, N. M. A., Karmana, I. W., & Trisnadewi, K. S. (2024). Mendalami Kesiapan UMKM dan Relevansi SAK EMKM Di Era Industri 4.0. *Owner*, 8(4), 4596–4601. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2442>
- Sitorus, J. H. E. (2015). Membawa Pancasila dalam Suatu Definisi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 254–271. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.086021>
- Elvadri, A. B., Karimah, A. U., Midaria, I. U., Shela, J. D., Deden, M., Adhani, M., & Susanti, N. M. (2023). Penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) Pada PT. Pertamina dalam Meningkatkan Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 223–231. <https://doi.org/https://doi.org/XX.XXXXX/wanargi>
- Engels, F. (2007). *Tentang DAS KAPITAL Marx* (E. Cahyono, Ed.). Dey's Renaissance
- Fadilah, A., Jaya, F., & Syam, A. (2024). Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Eentitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Sektor UMKM Studi Kasus Pada Usaha SRC Marhaeni. *Jurnal Bisnis Digital Dan Enterpreneur*, 2(2), 220–228. www.ojs.amiklps.ac.id
- Fuady, A. S. (2019). Islam dan Pendidikan: Studi Pemikiran Mohammad Hatta. *AT-TUHFAH : Jurnal Keislaman*, 7(1), 1–11.
- Fuady, A. S. (2020). Relevansi Pemikiran Pendidikan Mohammad Hatta terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 101–118.
- Guo, J., Huang, P., & Zhang, Y. (2020). Accounting Conservatism and Corporate Social Responsibility. *Advances in Accounting*, 51, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.adia.2020.100501>
- Gusneli, Sudarmanto, E., & Kartika Devi, E. (2023). Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Standar Akuntansi Internasional Terbaru (IFRS). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 2(03), 205–212.
- Hanani, S., & Sari, S. R. (2018). *Bung Hatta dan Pendidikan Karakter* (Nurhid, Ed.). Ar-Ruzz Media.
- Hariyati. (2011). Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia Ditinjau dari Filsafat Ilmu. *AKRUAL*, 2(2), 2502–6380. <http://fe.unesa.ac.id/ojs/index.php/akrl>
- Hasanah, I., Matondang, K. A., Sari, G., & Akbar, Mhd. A. (2024). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Perubahan Profitabilitas pada Perusahaan PT Unilever Tbk Indonesia. *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 342–348.
- Hasanah, U., Rasyiqah, S. Z., Mawaddah, W., & Muda, I. (2022). The Steps In The Accounting Cycle and How To Prepare Correcting Entries. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3), 2388–2394. <http://journalppw.com>
- Hatta, M. (1957). *The Co-operative Movement in Indonesia* (G. Kahin, Ed.). Cornell University Press.
- Hatta, M. (1972). *Portrait of a Patriot*. Mouton & Co.
- Hatta, M. (1975). *Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo?* Bulan Bintang Jakarta.
- Hendriwani, S. (2020). Teori Kelas Sosial dan Marxisme Karl Marx. *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat*, 2(1), 13–28. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/paradigma>
- Hutajulu, M. M. (2023). Filosofi Bung Hatta dalam Pendidikan. *Ensiklopedia Social Review*, 5(3), 63–69. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Iqbal, M. (2014). Mohammad Hatta Dan Partai Demokrasi Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran Hubungan Agama Dan Politik. *MADANIA*, 18(2), 201–214.
- Itang. (2016). *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam* (Arifin, M. Nur). Laksita Indonesia.
- Itasari, R. N., & Kristanto, A. B. (2018). Kerugian Konvergensi IFRS di Indonesia. *MODUS*, 31(1), 1–21.
- Kadri, M. H., Amin, J. M., & Bakar, Z. A. (2023). Examining The Value Relevance of Biological Assets and Their Fair Value Change in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences*, 13(1), 562–571. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS>

- Kamayanti, A. (2013). Riset Akuntansi Kritis: Pendekatan (Non) Feminisme Tjoet Njak Dhien. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 361–375.
- Kamayanti, A. (2020). How Long are the Titles behind Your Name? *Perspektif Akuntansi*, 3(1), 49–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/persi.vXiX.p49-59>
- Kamayanti, A. (2021). *Metodologi Penelitian Akuntansi Kualitatif Pengantar Religiositas Keilmuan (Edisi Revisi): Vol. Cetakan 2* (A. D. Mulawarman, Ed.). Peneleh.
- Kumarasiri, J., & Fisher, R. (2011). Auditors' Perceptions of Fair-Value Accounting: Developing Country Evidence. *International Journal of Auditing*, 15(1), 66–87. <https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2010.00423.x>
- Laaksonen, J. (2022). Translation, Hegemony and Accounting: A Critical Research Framework with An Illustration from the IFRS Context. *Critical Perspectives on Accounting*, 89, 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102352>
- Lestari, M. (2024). Perkembangan IFRS di Dunia dan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(3), 77–82.
- Lestari, T., Suranta, E., Midiastuty, P. P., & Fachruzzaman. (2020). Pengaruh Siklus Hidup Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*, 1(3), 169–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jakman.v1i3.20>
- Milne, M. J., Tregidga, H., & Walton, S. (2009). Words not actions! The Ideological Role of Sustainable Development Reporting. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 22(8), 1211–1257. <https://doi.org/10.1108/09513570910999292>
- Morawska, I. (2021). The Impact of the IFRS 15 Implementation on the Revenue-Based Earnings Management in Poland. *Journal of Economics and Management*, 43, 387–403. <https://doi.org/10.22367/jem.2021.43.18>
- Mantzari, E., & Georgiou, O. (2019). Ideological Hegemony and Consent to IFRS: Insights from Practitioners in Greece. *Critical Perspectives on Accounting*, 59, 70–93. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.06.003>
- Maulana, A. O. (2019). *Legitimacy Dynamics of Accounting Standards Setting : The Case of Indonesia*. University of Reading.
- Mulawarman, A. D. (2014). On Holistic Wisdom Core Datum Accounting: Shifting from Accounting Income to Value Added Accounting. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 22(1), 69–92.
- Munzir, E., & Syamsuddin, M. A. (2020). *Ekonomi Kerakyatan dalam Diskusi Dua Generasi*. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Murtianingsih, M., & Setiawan, A. H. (2016). The Implementation of Fair Value on Short Term Assesment of Biological Assets. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(1), 40. <https://doi.org/10.26675/jabe.v1i1.6728>
- Muttaqin, A. (2013). Karl Marx dan Friederich Nietzsche tentang Agama. *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 7(1), 1–10.
- Nastiti, A. D., & Ratmono, D. (2015). Analisis Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Nugroho, M. A., Aulia, N., Lestari, H., & Novitasari, B. T. (2023). Pergeseran dari Sistem Akuntansi Kontinental ke Sistem Akuntansi Anglo-Saxon di Indonesia. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 3(3), 365–385. <https://doi.org/10.53363/yud.v3i3.84>
- Nunes, M. F., & Park, C. L. (2017). Self-Claimed Sustainability: Building Social and Environmental Reputations with Words. *Sustainable Production and Consumption*, 11, 46–57. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2016.04.002>
- Oktavia, P. D., & Sunrowiyati, S. (2019). Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan UD. Karya Tunggal. *Jurnal PETA*, 4(1), 16–32.

- Pratiwi, L. L. (2022). Implementasi Blockchain pada Akuntansi dan Audit di Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2185–2203.
- Rapp, D. J., Herbener, J. M., & Gordon, D. (2024). On the Ethics of Fair Value Accounting: Distributive Effects, Distributive Injustice, and Implications for Social Peace. *Quarterly Journal of Austrian Economics*, 27(1), 1–33. <https://doi.org/10.35297/001c.117210>
- Ratnaningrum. (2021). *Akuntansi Pengantar I* (E. N. Hidayat, Ed.). Yayasan Prima Agus Teknik.
- Rukmana, R. (2017). Pengaruh International Financial Reporting Standards (IFRS) terhadap Kualitas Laba dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 14(3), 403–414. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/78/93>
- Saad, B. (2021). Independensi, Objektivitas dan Profesionalisme Dampaknya terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 14–23.
- Sari, I.P. (2021). Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, 4(1), 90–97.
- Septyan, K., & Mintoyuwono, D. (2023). Meretas Praktik Pendidikan Akuntansi yang Bela Negara. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 6(3), 293–308. <https://doi.org/10.33795/jraam.v6i3.003>
- Shahib, H. M. (2016). Revolusi Pendidikan Etika Akuntan Indonesia: Membuktikan Spirit Pendidikan Tan Malaka. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 1(02), 188–202. <https://doi.org/10.35706/acc.v1i02.536>
- Suseno, F. M. (1999). *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. PT Gramedia Pustaka Utama. <http://pustaka-indo.blogspot.com>
- Suyono, A. (2021). Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta serta Implikasinya. *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 9(2), 35–38.
- Syofyan, E. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)* (Hayat, Ed.). Unisma Press.
- Thesing, J., & Velte, P. (2021). Do Fair Value Measurements Affect Accounting-Based Earnings Quality? A Literature Review with A Focus on Corporate Governance as Moderator. *Journal of Business Economics*, 91(7), 965–1004. <https://doi.org/10.1007/s11573-020-01025-6>
- Triyuwono, I. (1997). “Akuntansi Syari’ah” dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 1(1), 3–46.
- Wahyudi, Y. (2022). *Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila*. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Widianingsih, L. P. (2021). Menghidupkan Semangat Founding Fathers Indonesia dalam Mewujudkan Beyond Economic Man: Ideologi Baru Akuntansi. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 4(1), 538–555.
- Wulandari, W., & Hasan, A. (2023). Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3586–3592. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9753>
- Yandari, A. D., & Rofik, M. (2019). Behavior Accounting As A History: Perspective Single and Double Entry BookKeeping. *Wacana Equilibrium: Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*, 7(1), 1–8.
- Yuan, Y., Lu, L. Y., Tian, G., & Yu, Y. (2020). Business Strategy and Corporate Social Responsibility. *Journal of Business Ethics*, 162(2), 359–377. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3952-9>
- Yusuf, N., Hasan, F., & Niu, F. A. L. (2019). Pemikiran Muhammad Hatta tentang Ekonomi Syariah. *Potret Pemikiran*, 23(1), 36–50.